



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF
COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KESEMBILAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa pada tanggal 6 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);
- c. bahwa untuk melaksanakan *Protocol* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KESEMBILAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 3 –

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Reputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,**



Lydia Silvanna Djaman

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KESEMBILAN
KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota dalam Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut "WTO");

TELAH melaksanakan tujuh putaran perundingan dan menghasilkan delapan set jadwal komitmen spesifik yang tercakup dalam Protokol untuk Melaksanakan Paket Pertama Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia; Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001; Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja; Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan

Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2007 di Bangkok, Thailand; Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2009 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja; dan Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada 20 Desember 2013 di Pakse, Republik Demokratik Rakyat Laos;

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas bersama dengan Peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Persetujuan Kerangka ASEAN (Perubahan) untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas telah ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, yang mencakup Angkutan Udara, memberikan langkah-langkah untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan hubungan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN.

MENCATAT Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN pada tanggal 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja yang akan memfasilitasi pergerakan orang ASEAN dalam melakukan perdagangan barang, jasa, dan investasi di wilayah tersebut dan pada saat mulai berlakunya persetujuan tersebut, Lampiran 1 akan menggantikan komitmen yang telah dibuat dalam *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS)/Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang berkaitan dengan mode 4 (Pergerakan Orang Perseorangan);

MEMPERHATIKAN target dan lini masa dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2007 di Singapura, yang di antaranya diberikan untuk

liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran liberalisasi berurutan yang berakhir pada tahun 2015;

TELAH melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan Paket Kesembilan Komitmen;

BERKEINGINAN untuk menyusun dalam suatu jadwal, komitmen-komitmen spesifik yang masing-masing Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain atas dasar Perlakuan yang Sama,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari jadwal konsolidasi dari Jadwal Komitmen-komitmen Spesifik, Jadwal Komitmen-komitmen Horizontal, dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari setiap Negara Anggota, yang wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Berdasarkan pada Jadwal-jadwal Komitmen Spesifik dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari setiap Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial dalam pelayanan angkutan udara satu sama lain atas dasar perlakuan yang sama.
3. Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
4. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang ditetapkan dalam Lampiran-lampirannya wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan ketujuh dari Negara-negara Anggota ASEAN kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, dan wajib berlaku efektif hanya di antara Negara-negara Anggota yang telah mengesahkan atau menerimanya. Untuk setiap Negara Anggota yang mengesahkan atau menerima Protokol setelah penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan ketujuh, Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan oleh Negara Anggota dimaksud.

5. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan suatu salinan naskah asli daripadanya kepada setiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib segera menyampaikan pemberitahuan mengenai pengesahan-pengesahan atau penerimaan-penerimaan yang dibuat sesuai ayat 4 kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Tanggal **6 November** Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, dalam suatu salinan naskah asli dalam Bahasa Inggris

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

DATO MUSTAPPA SIRAT
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

MAO HAVANNALL
Menteri Negara Penerbangan Sipil

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

IGNASIUS JONAN
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos:

BOUNCHANH SINTHAVONG
Menteri Pekerjaan Umum dan Angkutan

Untuk Pemerintah Malaysia:

DATO' SRI LIOW TIONG LAI
Menteri Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar:

HAN SEIN
Menteri Angkutan

Untuk pemerintah Republik Filipina:

JOSEPH EMILIO AGUINALDO ABAYA
Menteri Komunikasi dan Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

KHAW BOON WAN
Menteri Angkutan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

ARKHOM TERMPITTAYAPASITH
Menteri Angkutan

Untuk pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

DINH LA THANG
Menteri Angkutan

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
Semua sektor termasuk dalam jadwal	3. Tidak mengikat untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan modal asing atau kepentingan dalam perusahaan yang didirikan atau bermaksud untuk mendirikan suatu kehadiran komersial	<p>3. Sehubungan dengan kehadiran komersial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu dari 2 direktur atau lebih dari 2 direksi minimal 2 diantaranya pernah tinggal di Brunei Darussalam. - Semua Perusahaan berbadan hukum di luar Brunei Darussalam yang mendirikan atau telah mendirikan sebuah tempat usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen dari penduduk setempat untuk menerima proses jasa atau segala pemberitahuan yang dibutuhkan bagi perusahaan <p>4. Tidak mengikat kecuali untuk langkah-</p>	

	<p>4. Tidak mengikat kecuali untuk langkah-langkah yang menyangkut masuk dan kehadiran sementara dari perpindahan antar perusahaan pada level manajer, eksekutif, dan spesialis, sebagaimana di definisikan di bawah ini, yang merupakan pegawai pada firma yang menyediakan jasa dalam wilayah Brunei Darussalam dan yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan tersebut di luar brunei Darussalam untuk periode yang tidak kurang dari 1 (satu) tahun segera sebelum tanggal permohonan ijin masuk mereka dan yang termasuk dalam salah satu dari:</p> <p>a) Manajer – seseorang dalam organisasi atau orang perseorangan yang tugas utamanya mengarahkan organisasi atau suatu departemen atau sub divisi dari organisasi, mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Mereka tidak melibatkan pengawasan lini pertama,</p>	<p>langkah yang berkaitan dengan kategori orang perseorangan yang mengacu pada kolom akses pasar.</p>	
--	---	---	--

kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyedia jasa.

- b) Eksekutif- seseorang dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan aktual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.
- c) Spesialis- seseorang dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan (spesialis dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada anggota-anggota dari profesi yang berlisensi)

Ijin masuk untuk perpindahan antar perusahaan dibatasi selama tiga tahun

	yang dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun, hingga jangka waktu total tidak melebihi lima tahun.		
--	---	--	--

BRUNEI DARUSSALAM — DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor	Langkah-langkah liberilisasi di masa mendatang mempengaruhi pembatasan pada modal atau kepentingan asing di perusahaan yang didirikan di Brunei Darussalam wajib dijalankan dengan perlakuan yang berbeda atas langkah-langkah otoritas yang berwenang.	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah akan diberikan dengan perlakuan yang berbeda untuk penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan tertentu pembangunan Brunei Darussalam dengan kemampuan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis dari keikutsertaan asing pada perekonomian Brunei Darussalam.
	Dapat menjadi pilihan untuk masuk dan tinggal sementara bagi tenaga kerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber-sumber tradisional	Tidak ditentukan Brunei Darussalam akan secara berkala meninjau ulang langkah-langkah dimaksud berdasarkan pertimbangan langkah-langkah domestik dan nasional	Karena populasi yang kecil pemerintah perlu untuk mengatur arus dari tenaga kerja asing, baik yang terampil, untuk menjamin pembauran sosial di Brunei Darussalam

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 51%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Subsidi		(3), (4) Tidak mengikat untuk subsidi termasuk untuk penelitian dan pengembangan.	
Langkah-langkah Pajak		(1), (2), (3) Tidak ada dalam kaitannya dengan Pajak.	
Tanah		(3) Orang perseorangan dan badan hukum Non-Kamboja dapat menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah	
Hak yang diperoleh	Syarat-syarat kepemilikan, pengelolaan, pengoperasian, aktivitas bentuk dan lingkup badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam perijinan atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau pasokan jasa asing yang ada, tidak untuk dibuat lebih ketat daripada restriksi yang sudah ada pada saat kamboja masuk sebagai anggota WTO.		

Insentif penanaman modal	(3) Pemilik modal, yang mencari insentif berdasarkan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal, harus memiliki kewajiban menyediakan pelatihan yang cukup dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk untuk promosi ke psisi yang lebih tinggi.	(3) Tidak ada	
Kehadiran orang perseorangan	<p>(4) Tidak mengikat, kecuali untuk langkah-langkah yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang masuk dalam salah satu kategori berikut:</p> <p><u>Kunjungan pelaku usaha</u> Orang perseorangan yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasuki Kamboja dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan usaha, membuka kontak usaha termasuk melakukan negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau aktivitas serupa lainnya; - Tinggal di Kamboja tanpa menerima pendapatan dari sumber-sumber penghasilan di Kamboja - Tidak terlibat dalam melakukan penjualan langsung kepada publik atau pemasok jasa 	(4) Tidak mengikat, kecuali untuk langkah-langkah yang mempengaruhi kategori-kategori yang mengacu pada akses pasar.	

	<p>Visa masuk untuk kunjungan pelaku usaha wajib berlaku selama periode 90 hari dengan ijin tinggal awal selama 30 hari, yang bisa diperpanjang.</p>		
	<p><u>Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial:</u> Seseorang yang bekerja pada posisi kepala atau manajer yang menerima upah dari entitas yang tersebut di bawah ini, yang bertanggung jawab dalam pendirian, kehadiran komersial penyedia jasa dari negara anggota di Kamboja yang mendukung pekerjaan perorangan yang telah dijelaskam dalam butir a,b,dan c dibawah. Perorangan tersebut tidak termasuk dalam izin tinggal dalam waktu maksimum.</p> <p><u>Perpindahan antar perusahaan</u> Orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan di negara anggota lainnya untuk periode tidak kurang dari 1 tahun dan yang mencari izin masuk sementara untuk menyediakan jasa melalui cabang, pembantu dan afiliasi perusahaan di Kamboja dan adalah sesorang:</p> <p>a) <u>Eksekutif</u>: tanpa memerlukan ujian</p>		

dalam bursa tenaga kerja, seseorang dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan actual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.

- b) Manajer: tanpa memerlukan ujian dalam bursa tenaga kerja, orang perseorangan yang dipekerjakan oleh suatu badan hukum dan memiliki pengetahuan produk, jasa, perlengkapan, penelitian, teknik atau pengelolaan dari entitas yang berbadan hukum dan yang secara utama mengarahkan organisasi atau suatu departemen dari organisasi; mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memecat atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau

melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Mereka tidak melibatkan pengawasan lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyedia jasa.

- c) Spesialis: orang perseorangan dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metode-metode atau pengelolaan.

Ijin tinggal dan ijin kerja sementara diisyaratkan bagi orang perseorangan yang didefinisikan dibawah perpindahan antar perusahaan. Ijin tersebut diterbitkan selama dua tahun dan bisa diperbaharui setiap tahun maksimal keseluruhan lima tahun

KAMBOJA — DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Audiovisual				
Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film	Langkah-langkah yang didasarkan atas perjanjian produksi bersama karya audiovisual, yang menerapkan Perlakuan Nasional pada	Negara-negara yang sedang maupun yang akan melaksanakan perjanjian bilateral atau	Tidak ditentukan	Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan jalinan budaya diantara Negara-

Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film	karya audiovisual yang masuk ruang lingkup perjanjian dimaksud. Langkah-langkah yang memberikan keuntungan bagi program pendukung (seperti <i>“Fond d’aide a la production de l’agence intergouvernemental de la Francophine”</i>) pada karya audiovisual dan bagi penyedia yang memenuhi kriteria asal pekerjaan dimaksud.	multilateral. Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah ditandatangani dalam bidang kerjasama budaya.	Tidak ditentukan	negara yang berkepentingan. Program ini bertujuan untuk memelihara dan mempromosikan identitas budaya Negara-negara yang telah menjamin kerjasama budaya dengan Kamboja.
Produksi dan distribusi karya Audiovisual melalui transmisi siaran kepada publik	Langkah-langkah yang memperpanjang Perlakuan Nasional untuk pekerjaan audiovisual yang memenuhi kriteria asal tertentu yang berkaitan dengan akses terhadap transmisi penyiaran.	Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah disepakati dalam bidang kerjasama budanya	Tidak ditentukan	Tujuan langkah-langkah ini, didalam sektor, adalah untuk mempromosikan nilai-nilai budaya baik didalam Kamboja sendiri, maupun dengan negara-negara lain, yang termasuk dalam kawasan.
Angkutan darat	Perjanjian fasilitasi angkutan dan angkutan transit	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Kebutuhan untuk mempromosikan pariwisata dan perdagangan dalam bidang jasa angkutan terutama diantara negara-negara tetangga.
Angkutan perairan internal	Menetapkan prosedur, biaya-biaya dan regulasi khusus yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di lembah sungai Mekong	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Menjamin dan nenfasilitasi pelayaran di sungai Mekong

Angkutan laut	Menetapkan prosedur, biaya dan regulasi khusus untuk angkutan laut yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di Teluk Siam.	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Menjamin dan memfasilitasi pelayaran di Teluk Siam
---------------	--	--	------------------	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat	1) Tidak ada	1) Tidak ada	

Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak mengikat	3) Tidak mengikat	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	
---	---	---	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	
---	--	---	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

Sewa Beli Pesawat Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
--	---	--	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------

Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
------------------------------------	---	--	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------

Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
------------------------------------	---	--	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------

Jasa Pengisian Bahan Bakar	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
-----------------------------------	---	--	--

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Perawatan Pesawat Udara Lini	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
-------------------------------------	---	--	--

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
SELURUH SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial dari setiap pemasok jasa asing dapat dalam bentuk usaha patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya</p> <p>Usaha patungan seharusnya memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>(i) harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>(ii) Kepemilikan saham asing tidak boleh melebihi 49 % (Perseroan Terbatas/PT), dapat dimiliki oleh Mitra Asing</p>	<p>3) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak yang bukan penduduk dan dikenakan pajak 20% apabila mereka mendapat penghasilan yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia yang meliputi:</p> <p>a) Bunga</p> <p>b) Royalti</p> <p>c) Deviden</p> <p>d) Pungutan dari jasa yang dilakukan di Indonesia</p> <p>Tarif pajak dapat diubah karena perjanjian pajak</p> <p><u>Pengambilan Hak Atas Tanah</u></p> <p>Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pihak asing (baik badan hukum maupun orang perseorangan) tidak diijinkan memperoleh hak milik atas tanah. Namun demikian, perusahaan patungan dapat memiliki Hak Guna Usaha dan</p>	

	<p>4) Tunduk pada peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Imigrasi, hanya para direktur, manajer dan tenaga ahli/penasihat, kecuali secara khusus disebutkan sebaliknya, diijinkan untuk tinggal maksimum selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Manajer dan para tenaga ahli (transfer antar perusahaan) diijinkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi.</p> <p>Ijin masuk dan tinggal sementara dari pelaku usaha diperbolehkan selama 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal 120 hari.</p>	<p>Hak Guna Bangunan, dan mereka dapat menyewa tanah dan bangunan.</p> <p>Setiap badan hukum atau orang perseorangan seharusnya memenuhi persyaratan kualifikasi profesi.</p> <p>4) Pungutan atas pekerja asing</p> <p>Setiap orang asing yang memasuki jasa dikenakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p><u>Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.</u></p> <p>Setiap pekerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan atau jenis badan hukum lainnya dan atau penyedia jasa perorangan harus mempunyai surat ijin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja.</p>	
--	---	--	--

--	--	--	--

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Definisi:

“Direktur” : seorang atau sekelompok orang yang dipercaya oleh pemegang saham dari suatu entitas penyedia jasa, yang mempunyai hak control dan kendali akhir atas perusahaan tersebut dan bertanggung jawab secara hukum untuk bertindak atas nama perusahaan-perusahaan baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.

“Manajer” : pegawai senior dari suatu pemasok jasa yang memiliki tugas utama mengarahkan manajemen organisasi, menerima pengawasan dan arahan umum terutama dari dewan direksi badan usaha, termasuk mengarahkan suatu pemasok jasa atau departemen atau sub-divisi daripadanya, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan dari pengawas lain, professional atau pekerja manjerial atau yang memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memberhentikan atau merekomendasikan atau tindakan-tindakan kepegawaian lainnya.

“Tenaga ahli/Penasehat teknis” : orang yang dipekerjakan oleh suatu pemasok yang memiliki standard tinggi atau umum

- (i) kualifikasi yang merujuk pada suatu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknik spesifik atau
- (ii) pengetahuan yang diperlukan atau terkait dengan jasa, perlengkapan penelitian, teknik atau manajemen.

“Operasional Bersama”: suatu operasional bersama yang dilakukan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek/bisnis tanpa mendirikan suatu badan hukum baru sesuai dengan hukum Indonesia.

“Badan Usaha Patungan”: suatu badan usaha patungan adalah suatu badan hukum yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).

“Kontrak Manajemen”: Kontrak Manajemen adalah kontrak yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama pengelolaan sifat sementara antara modal Indonesia dengan modal asing.

“Kunjungan Bisnis” : orang perseorangan yang tinggal di Indonesia untuk tujuan berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk dalam negosiasi untuk penjualan jasa layanan dan/ atau kegiatan serupa lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pembentukan kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dan/ atau pendapatan langsung dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat dalam penjualan langsung atau penyediaan layanan kepada masyarakat umum.

INDONESIA— DAFTAR PENGECEUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--

Jasa Perbankan	Langkah-langkah yang berkaitan dengan usaha patungan nasional dan asing dimana masuknya bank asing di Indonesia diperbolehkan secara timbal balik (sesuai dengan pasal 14 (3) Keputusan Menteri Keuangan No 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993) sehubungan dengan usaha patungan, lisensi hanya diberikan kepada bank asing dari negara yang mengadopsi langkah-langkah timbal balik mengenai bank Indonesia	Semua negara yang menerapkan langkah-langkah timbal balik mengenai bank-bank Indonesia	Menangguhkan sampai akhir periode 60 hari mulai tanggal 1 november 1997 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan kedua mengenai jasa keuangan yang diadopsi oleh dewan untuk perdagangan jasa pada tanggal 21 Juli 1995.	Menjamin perlakuan yang sama terhadap keinginan nasional Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikan bank diatas kapal
Pergerakan Personil (Pekerja semi terampil)	Pekerjaan tingkat rendah diperuntukan bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan langkah-langkah Pemerintah, pengecualian terbatas dapat diberikan kepada warga negara tertentu	Warga negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia telah diberi akses terbatas terhadap pekerjaan tingkat rendah	Tidak ditentukan	Pembangunan kawasan ini sedang dilakukan dan untuk konfirmasi program ini, diputuskan untuk memberikan akses terbatas pada penduduk tingkat rendah kepada warga di sejumlah negara yang terbatas.
Jasa Konstruksi (proyek yang didanai pemerintah)	Langkah-langkah yang berkaitan dengan daftar pendek istimewa dalam penawaran kompetitif internasional	Warga negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah diberi perlakuan khusus	Langkah-langkah ini harus dipertahankan sepanjang perjanjian ASEAN tetap berlaku.	Pelaksanaan skema daftar pendek istimewa untuk kontraktor ASEAN meningkatkan kemajuan pekerjaan sipil, kontruksi industri dan pembangunan

				ekonomi kawasan ASEAN
--	--	--	--	-----------------------

Catatan:) Pembebasan ini dihapus sebagai Penawaran Plus GATS

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dari Pemasok Jasa Asing dan/atau Penyedia jasa sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
II. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
SELURUH SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing dapat berbentuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suatu usaha patungan dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos - Suatu perusahaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing - Suatu kantor cabang atau perwakilan <p>Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing wajib mendapat persetujuan dari otoritas berwenang yang kompeten. Perusahaan dengan modal asing memerlukan izin investasi, yang menetapkan syarat operasi, dan kontrak kerjasama bisnis</p>	<p>3) Pemasok jasa asing di Laos dapat menyewa tanah di Laos dan dapat memindahkan hak sewa tersebut dan mereka dapat memiliki hasil pengembangan lahan dan property bergerak lainnya dan memindahkan kepemilikan mereka.</p> <p>Langkah-langkah pajak, yang umumnya berkaitan dengan usaha kecil dan menengah dapat menghasilkan perbedaan perlakuan yang mendukung layanan dan pemasok jasa di Laos</p>	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS— DAFTAR PENGECEUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Akses Pasar dan perlakuan nasional bersifat timbal balik, dan ketentuan berdasarkan persetujuan angkutan udara bilateral	Semua negara yang telah melakukan penandatanganan persetujuan tentang angkutan udara bilateral dengan negara Laos diantaranya adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia - Malaysia - Kamboja - Singapura - Myanmar - Vietnam - China - Thailand 	Tanggal kadaluwarsa atau penghentian persetujuan angkutan udara bilateral. Hal ini akan ditinjau untuk tujuan pengembangan lebih lanjut	Hubungan timbal balik dan/atau persetujuan bilateral
Jasa auditor	Persetujuan Bilateral berdasarkan hubungan timbal balik	Negara-negara pada layanan tertentu dapat diberikan oleh warga negara Laos	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Penerbitan koran	Pemberian izin harus didasarkan pada persetujuan bilateral	Negara yang memiliki perjanjian dengan Laos	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Jasa hukum		Semua Negara	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Perbankan dan jasa keuangan lainnya	Langkah-langkah yang mempengaruhi penyediaan layanan perbankan dan keuangan lainnya diberikan secara bilateral dengan negara-negara yang memiliki persetujuan	Semua Negara	Tidak ditentukan	Tujuan timbal balik, dan stabilitas keuangan

	dengan Laos			
--	-------------	--	--	--

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dapat dengan cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan satu atau lebih investor domestik Laos; • Perusahaan asing sepenuhnya (100 % saham asing) • Kantor cabang atau kantor perwakilan; a) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum memperoleh izin dari Komite Manajemen Investasi Asing b) Saham asing tidak kurang dari 30 % (untuk kerja sama)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dapat dengan cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan satu atau lebih investor domestik Laos; • Perusahaan asing sepenuhnya (100 % saham asing); • Kantor cabang atau kantor perwakilan a) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum memperoleh izin dari Komite Manajemen Investasi Asing; b) Saham asing tidak kurang dari 30 % (untuk kerja sama)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara (CPC 74800)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Pesawat Udara Lini	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengisian Bahan Bakar	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Kargo (CPC 741)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
III. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI KECUALI DINYATAKAN SEBALIKNYA		<p>3) <u>Tanah, Properti dan Real Estate</u> Persetujuan dapat ditolak jika akuisisi, penyelesaian atau transaksi atas tanah atau setiap kepemilikan tanah atas tanah, properti dan real estate yang dipergunakan untuk maksud spekulasi atau non produktif atau untuk maksud-maksud yang mungkin bertentangan dengan kepentingan Negara.</p> <p><u>Insentif/pilihan</u> Insentif dibatasi kepada perusahaan yang dimiliki oleh orang Malaysia yang memenuhi syarat dalam sektor jasa yang dipromosikan oleh Pemerintah.</p> <p>Setiap langkah-langkah dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada Pribumi perusahaan-perusahaan berstatus Pribumi, perusahaan dan institusi pengelola</p>	

		<p>keuangan yang didirikan untuk memenuhi tujuan dari Langkah-langkah Ekonomi Baru dari Langkah-langkah Pembangunan Nasional wajib tidak diikat</p> <p>Perusahaan dimana Pemerintah memiliki kepentingan wajib, dalam memperoleh jasa, harus diprioritaskan kepada pemasok jasa dimana Pemerintah memiliki kepentingan. Persyaratan ini tidak untuk menghalangi akuisisi jasa dari pemasok jasa lainnya dimana jasa-jasa mereka kompetitif dalam hal harga, kualitas dan pengiriman.</p>	
--	--	--	--

MALAYSIA— DAFTAR PENGECEUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor	Liberalisasi atas langkah-langkah yang berdampak terhadap pergerakan tenaga kerja semi terampil dan tiak terampil asing ke Malaysia akan dijadikan dengan cara yang berbeda berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti kedekatan bersebelahan atau wilayah, keserasian agama dan/atau budaya	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah diperlukan untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan pengaturan sesuai perjanjian bilateral yang ada, dan - Memastikan bahwa perpindahan tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil asing berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan keserasian lingkungan industry di Malaysia
Semua sector	Liberalisasi atas langkah-langkah yang ada atau langkah-langkah mendatang yang membatasi keikutsertaan atau kepentingan modal asing atau perusahaan dan kegiatan usaha di Malaysia wajib dijalankan dalam suatu cara yang istimewa dan dibedakan.	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah akan diberlakukan dengan cara yang berbeda kepada para penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan pembangunan tertentu Malaysia dengan kemampuan dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah

				untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari keikutsertaan asing dalam perekonomian Malaysia.
--	--	--	--	--

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi saham asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi saham asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Pesawat Lini	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi saham asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
IV. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
JASA ANGKUTAN UDARA	<p>3) (a) Kehadiran komersial dari pemasok dan/ atau penyedia jasa asing sesuai dengan undang-undang perusahaan Myanmar nomor 1914, undang-undang kebersamaan nomor 1932, undang-undang perusahaan khusus nomor 1950, undang-undang investasi asing nomor 2012, peraturan investasi asing tahun 2013, Pemberitahuan yang ada dari Komisi Investasi Myanmar dan Undang-undang Investasi Warga Negara Myanmar (2013).</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (2012), investasi dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini:</p> <p>(i) melakukan investasi oleh orang asing dengan modal asing seratus persen untuk bisnis yang diizinkan oleh Komisi;</p> <p>(ii) melakukan perusahaan patungan antara pihak asing dan warga</p>	<p>3) (a) Menurut Notifikasi No.167 / 2011, Orang Asing Bukan Penduduk akan dikenai pajak pemotongan sebagai berikut:</p> <p>Jenis orang asing penghasilan bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bunga 15 % • Royalti untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb 20% • Pembayaran kepada kontraktor dan pembelian barang di Myanmar dan melalui kontraktor, persetujuan yang disepakati secara konsisten, dilakukan oleh organisasi Negara, komite pembangunan kota, masyarakat koperasi, perusahaan yang terdaftar dan organisasi non pemerintah 3.5%. 	

	<p>negara atau departemen dan organisasi pemerintah yang bersangkutan;</p> <p>(iii) melakukan kontak secara sistem sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak</p> <p>Investasi yang diusulkan dapat ditolak karena adanya implikasi seperti pengaturan keamanan yang terkait dengan risiko keamanan dan kepatuhan terhadap kondisi yang ada.</p> <p>Dalam membentuk investasi di Myanmar, itu harus dibentuk sebagai perusahaan sesuai dengan hukum yang ada.</p> <p>(b) Pendirian perusahaan, yang tidak melibatkan perusahaan negara harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Jika investasi tersebut melibatkan perusahaan negara, penggabungan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-Undang Kemitraan 1932, Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950, Perusahaan Myanmar (perubahan) Undang-Undang 1955 dan Peraturan Perusahaan Myanmar 1957.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran kontraktor dan pembelian barang di Myanmar oleh kontraktor sesuai dengan kesepakatan bersama dilakukan untuk pihak asing yang tidak terdaftar dan perusahaan asing 3.5% <p>Menurut undang-undang perpajakan 2014, pajak penghasilan 35 % harus dinilai atas penghasilan total orang asing non-penduduk sebelum dikurangi dengan tunjangan yang ditentukan oleh undang-undang pajak penghasilan pasal 6 dan 6 (a). jika penghasilan dalam mata uang asing, pajak penghasilan harus dibayar dengan mata uang asing. Pajak menurut bagian 3 (k) undang-undang pajak penghasilan, mengatur orang asing sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar selama tidak kurang dari 183 hari selama tahun pendapatan. (ii) dalam kasus perusahaan, perusahaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang perusahaan tersebut atau undang-undang lain yang ada seluruhnya 	
--	---	--	--

	<p>(c) Kegiatan pelayanan dibatasi berdasarkan Bagian 3 dari Undang-Undang Usaha Ekonomi Negara (1989). Namun, kegiatan ini dapat diijinkan oleh pemberitahuan Kabinet sesuai dengan bagian 4 dari undang-undang tersebut.</p> <p><u>Pajak</u></p> <p>Pada bagian 27 Undang-undang Penanaman Modal Asing disahkan pada 2 november 2012, Komisi Investasi myanmar wajib untuk mempromosikan investasi asing di dalam Negara, memberikan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut, termasuk tahun dimulainya produksi barang atau jasa. Selain itu, satu atau lebih dari satu atau semua pembebasan pajak yang tersisa atau keringanan pajak dapat diberikan jika diterapkan.</p>	<p>atau sebagian dengan pemegang saham asing</p> <p>(iii) dalam hal asosiasi orang selain perusahaan, sebuah asosiasi yang dibentuk seluruhnya atau sebagian dengan orang asing, dan dimana control, pengelolaan dan pengambilan keputusan atas urusannya berada dan dilaksanakan seluruhnya di uni Myanmar.</p> <p>Dalam hal ini, pekerja asing dan staf yang bekerja paling sedikit enam bulan (183 hari) di myanmar dan perusahaan asing yang dibentuk di Myanmar dapat dianggap sebagai orang asing yang tinggal di negara tersebut.</p> <p>(b) Pengacara asing dapat melakukan pelayanan kepada klien di Myanmar namun tidak diizinkan untuk berlatih di pengadilan hukum Myanmar.</p> <p>(c) kehadiran komersial penyedia jasa asing harus tundak pada perizinan oleh otoritas</p>	
--	---	--	--

		<p>pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>(d) Berdasarkan Undang-Undang pertanahan 2012 dan pengalihan Undang-Undang pembatasan kekayaan terbatas (2005), organisasi asing dan orang-orang tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dengan sewa jangka panjang, tergantung pada keadaan individu.</p>	
--	--	--	--

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perawatan Pesawat Udara Lini	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Ramp	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Bagasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Penumpang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	<p>3) <u>Dalam kegiatan-kegiatan yang dilindungi secara jelas oleh Hukum untuk kewarganegaraan Filipina (seperti modal asing hanya terbatas pada saham minoritas):</u></p> <p>Keikutsertaan para penanam modal asing pada badan-badan pengurus dari setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang secara jelas dilindungi oleh hukum bagi warga negara Filipina dimana pembagian modal asing bagi entitas-entitas dimaksud dibatasi secara proporsional.</p> <p>Semua pejabat eksekutif dan pengelola harus merupakan warga negara Filipina.</p> <p><u>Penguasaan Tanah</u> Semua tanah untuk kepentingan umum dikuasai oleh Negara Hanya warga negara Filipina atau korporasi atau asosiasi yang</p>	<p>3) <u>Akses Kredit Dalam Negeri</u></p> <p>Suatu firma asing, yang terlibat dalam kegiatan nonfabrikasi dengan sendirinya dapat meminjam peso, wajib mematuhi jangka waktu peminjaman, dengan rasio perbandingan utang dengan modal 50-50. Firma-firma asing yang tercakup meliputi:</p> <p>a) Kemitraan, yang lebih 40 persen, modalnya dimiliki oleh bukan warga negara Filipina dan</p> <p>b) Korporasi, yang lebih dari 40 persen modalnya dalam bentuk saham terdaftar di bursa saham dimiliki oleh bukan warga negara Filipina.</p> <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk bank-bank dan perantara-perantara keuangan nonbank</p>	

	<p>modalnya setidaknya 60 persen dimiliki oleh warga negara dimaksud dapat memiliki tanah selain daripada tanah-tanah public dan dapat memiliki tanah public itu melalui sewa beli.</p> <p>Para penanam modal asing dapat melakukan sewa beli hanya pada lahan-lahan milik pribadi.</p> <p>4) <u>Ijin Masuk dan Tinggal Sementara Bagi Orang Perseorangan Yang Memasok Jasa</u></p> <p>Warga negara asing dapat diijinkan masuk Filipina untuk pemasok jasa setelah terdapat penetapan bahwa tidak ada orang Filipina yang kompeten, mampu dan bersedia, pada saat pemberlakuan untuk melaksanakan jasa dimaksud sebagaimana diinginkan oleh warga negara dimaksud¹</p>		
--	--	--	--

1. Filipina wajib melakukan peninjauan kembali ketentuan ini dalam waktu 2 tahun setelah mulai berlakunya persetujuan ini untuk Filipina

FILIPINA — DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor				
Ijin masuk dan tinggal sementara bagi orang perseorangan yang memasok jasa	<p>Visa kategori khusus disediakan bagi pedagang dan investor dari negara-negara yang mana Filipina telah mendatangi perjanjian tentang hak untuk masuk bagi perdagangan dan investor.</p> <p>Di bawah kategori khusus ini, seleksi bursa tenaga kerja ditiadakan dan prosedur masuk yang diberikan disederhanakan.</p>	Semua negara	Tanggal kadaluarsa atau berakhirnya perjanjian bilateral tentang hak untuk masuk bagi perdagangan dan investor.	Untuk memudahkan masuk ke Filipina, atas dasar timbal balik, dari negara asing untuk maksud perdagangan, penanaman modal dan kegiatan terkait.
Jasa angkutan laut				
Perdagangan jalur kargo	<p>Peraturan eksekutif 769 memberikan pengaturan pembagian kargo pengecualian/ perlakuan khusus dengan negara-negara yang merupakan para pihak UNCTAD Liner Code</p> <p>Sesuai pengaturan yang disebutkan diatas, suatu pihak UNCTAD Liner Code secara efektif melaksanakan aturan hukum setidaknya 40% saham dari perdagangan kargo Liner ekspor dan impor bilateral dengan Filipina.</p>	Semua negara yang telah menyetujui UNCTAD Liner Code	Tidak ditentukan	Memastikan partisipasi efektif armada laut Filipina dalam perdagangan kargo liner Filipina

Angkutan Cabotage	Akses ke cadangan pelayaran domestik untuk kapal yang dimiliki atau terdaftar di Filipina. Namun, akses terbatas ke pengiriman domestik diberikan ke negara-negara dimana Filipina telah menyelesaikan kesepakatan mengenai hubungan baik, perdagangan dan navigasi.	Semua negara	Tanggal kadaluarsa atau penghentian perjanjian bilateral di Indonesia pada hubungan baik perdagangan dan navigasi	Izin akses terbatas pada angkutan cabotage secara hubungan timbal balik
Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya (termasuk asuransi)	Sehubungan dengan pemberian otorisasi untuk pembentukan kehadiran komersial atau perluasan operasi yang ada di Jasa Keuangan di Filipina, perlakuan yang baik akan diberikan, berdasarkan pertimbangan, kepada pemasok jasa keuangan dari Anggota lain yang menyetujui perlakuan yang menguntungkan terhadap layanan keuangan pemasok Filipina	Semua negara	Tidak ditentukan	Untuk mempromosikan liberalisasi yang lebih besar dalam layanan keuangan antara Filipina dan Anggota lainnya dengan cara yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Filipina di sektor keuangan

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada, kecuali pengiriman secara online dan agen-agennya dengan persyaratan a) Persyaratan modal minimum b) Kepemilikan saham maksimum sebesar 40 %; dan c) Persyaratan obligasi penanggung. 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak mengikat 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak (CPC 83104)	1) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 2) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 3) Tidak ada	1) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 2) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Kargo Udara	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

* Dikarenakan kelayakan teknis

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Bagasi	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

* Dikarenakan kelayakan teknis

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Penumpang	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

* Dikarenakan kelayakan teknis

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

4) Kehadiran orang

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Pesawat Lini	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

Pertemuan Negosiasi AFAS Paket 8 –Paket 9

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) kehadiran orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (perbaikan)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
SELURUH SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI		<p>3) Kehadiran Komersial, hak pendirian dan perpindahan dari badan hukum tunduk kepada kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang asing yang ingin mendaftar sebuah firma usaha harus memiliki seorang manajer local yang harus merupakan warga negara Singapura atau seorang Penduduk Tetap Singapura atau seorang Pemegang Ijin Kerja Singapura. (namun demikian, orang asing yang merupakan Penduduk Tetap Singapura atau Pemegang ijin kerja Singapura dapat mendaftarkan usahanya tanpa menunjuk seorang manajer lokal) - Setidak-tidaknya satu direktur dari perusahaan harus merupakan penduduk setempat - Seluruh kantor cabang perusahaan asing yang terdaftar di Singapura harus memiliki setidaknya 2 agen local. (untuk menilai sebagai 	

		penduduk local, seseorang seharusnya merupakan warga negara Singapura, atau Penduduk Tetap Singapura, atau Pemegang ijin Kerja Singapura)	
	1) 2) 3) Komitmen spesifik dalam akses pasar dalam semua sector atau subsector, melalui berbagai moda pengiriman, wajib tidak ditafsirkan untuk mengabaikan pembatasan yang dibentuk di sektor jasa keuangan.	1) 2) 3) Tidak mengikat untuk subsidi kecuali komitmen spesifik yang tercantum dalam dokumen WTO GATS/SX/76 (15 April 1994), GATS/SC/76 Suppl.2 (11 April 1997) dan GATS/SC/76 Suppl.3 (26 Feb 1998)	

SINGAPURA — DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor Kehadiran: -tidak terampil dan semi terampil orang perseorangan - keterampilan seseorang (termasuk pengrajin yang ahli dalam perdagangan tertentu, namun tidak menyertakan spesialis/ tenaga professional di tingkat menejemen)	Lebih disukai untuk pekerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber tradisional	Tidak ditentukan Singapura akan secara berkala meninjau ulang langkah-langkah dimaksud berdasarkan langkah-langkah domestik dan nasional	Keterbatasan lahan dan kebutuhan mendasar interaksi sosial antar populasi multi ras, pemerintah perlu mengatur arus dari tenaga asing, baik yang terampil dan tidak terampil, untuk memastikan bahwa Singapura tidak kelebihan penduduk dan orang asing yang berpotensi mengganggu tatanan sosial.
Semua Sektor Perjanjian Jaminan Investasi (<i>Investment Guarantee Agreement /IGAs</i>)	Jaminan investasi : misalnya kewajiban melindungi investasi asing dari kejadian tidak terduga pada suatu negara, perang dan lain-lain hanya diberikan kepada yang sudah menandatangani perjanjian persetujuan jaminan investasi	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Saat ini, kewajiban beberapa negara untuk melindungi investasi asing dari kejadian tidak terduga diatur oleh ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian jaminan investasi secara bilateral. Kesepakatan tersebut juga membantu memberikan jaminan ekonomi dan politik untuk promosi hubungan bilateral.

Skema kredit pajak persemakmuran	Bab 48 dari undang-undang pajak penghasilan mengatur pemberian keringanan terhadap pajak Singapura yang harus dibayar atas penghasilan yang berasal dari negara persemakmuran	Negara-negara persemakmuran yang memberikan bantuan timbal balik	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Ini merupakan bagian dari kerjasama antara Singapura dengan negara-negara persemakmuran.
Jasa hukum	Semua langkah-langkah yang berhubungan dengan ketentuan jasa hukum di Singapura	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Pembebasan ini diperlukan mengingat pendirian firma hukum asing di Singapura didasarkan pada persetujuan kasus per kasus.
Radio dan Televisi Radio dan televisi didefinisikan meliputi: - Penyiaran bebas mengudara - Tv kabel dan berlangganan - Penyiaran langsung melalui satelit - Tele teks	Kementerian informasi, komunikasi dan seni Singapura memberikan hak siaran dan transmisi khusus kepada negara tertentu yang mana negara tersebut telah mendatangi perjanjian bilateral	Semua Negara	Singapura akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Untuk meningkatkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya

- Semua jasa penyiaran yang terdaftar pada daftar klasifikasi sector jasa MTN.GNS/W/120				
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Akses pasar dan langkah-langkah nasional didasarkan pada timbal balik dalam konsesi bersama, namun tidak harus di wilayah yang sama, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama hubungan udara bilateral	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Saat ini, kondisi pada tingkat akses pasar diberikan pada jasa angkutan udara terutama diatur dalam perjanjian multilateral dan/atau perjanjian hubungan udara bilateral lainnya. Selain itu, “lampiran pada jasa angkutan udara” yang terdapat dalam GATS saat ini hanya memiliki aplikasi terbatas untuk tindakan yang mempengaruhi sektor jasa angkutan udara.
Jasa Angkutan Laut - Penyimpanan dan pergudangan - pengiriman barang kargo - pengangkutan di sisi darat - Tempat Pengumpulan Kontainer	Pelaksanaan komitmen mengikat untuk tingkat akses pasar dan perawatan saat ini pemasok jasa dan layanan, pada 4 sub sektor akan dilakukan melalui perjanjian pengiriman bilateral	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Beberapa mitra dagang Singapura tidak sesuai dengan perusahaan singapura yang memiliki akses yang memuaskan terhadap layanan angkutan laut di wilayahnya

Jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya	<p>Berdasarkan perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan antara Singapura dan Brunei, otoritas penerbit mata uang dari Singapura akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima dari bank, uang kertas dan logam/koin yang dikeluarkan oleh penerbit lainnya, sama dan tanpa biaya dan untuk menukarkan uang kertas dan koin ke dalam mata uang negara bersangkutan; dan - Mengatur pengiriman kembali atas biaya dari otoritas penerbit mata uang terkait, uang kertas dan koin dikeluarkan oleh otoritas penerbit mata uang lainnya dan untuk menerima nilai nominal yang setara dengan setiap mata uang yang disepakati 	Singapura	Tidak ditentukan, sampai salah satu negara mengakhiri perjanjian ini	Perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan dimulai tahun 1967 yang berasal dari hubungan sejarah dan ekonomi khusus antara Singapura dan Brunei.
--	---	-----------	--	---

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Saham asing sampai dengan 70 %.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Saham asing sampai dengan 51 %.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tanpa Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Saham asing sampai dengan 51 %	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Kargo Udara	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

* Dikarenakan kekuranglayakan teknis

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
SELURUH SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial pada sektor atau subsektor dalam jadwal ini diijinkan hanya melalui perseroan terbatas yang terdaftar di Thailand atau jenis badan hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam komitmen khusus sektor dimana perusahaan tersebut didirikan dan terdaftar, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Thailand dan harus temui salah satu dari kondisi yang ditunjukkan dalam sektor komitmen khusus berikut :</p> <p>3.1 Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 70 persen dari modal terdaftar dan hanya beroperasi melalui usaha bersama dengan orang yuridis nasional Thailand; atau</p> <p>3.2 Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 51 persen dari modal terdaftar dan hanya beroperasi</p>	<p>3.3, Badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing.</p> <p>3.1 dan 3.2, sebelum mendapatkan lisensi atau sertifikat, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh otoritas terkait.</p> <p>Dalam menetapkan kehadiran komersialnya, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus mengajukan sertifikat operasi bisnis sesuai dengan perjanjian atau kewajiban menurut pasal XI Undang-Undang Bisnis Asing; Peraturan Menteri Menetapkan Aturan dan prosedur yang berkaitan dengan Permohonan Sertifikat Bisnis Asing B.E. 2546 (2003). Menurut pasal XIV dan XIV bis dari GATS, pemasok layanan diharuskan untuk</p>	

	<p>melalui usaha patungan dengan orang yuridis nasional Thailand;</p> <p>3.3 a) Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% dari modal terdaftar; dan</p> <p>b) Jumlah pemegang saham asing harus kurang dari setengah dari jumlah pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.</p>	<p>mematuhi bagian V dari Undang-Undang Bisnis Asing;</p> <p>Badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan Thailand dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 49 % dari modal terdaftar: Tidak ada.</p> <p>Tidak terikat untuk tindakan yang berkaitan dengan subsidi atau hak istimewa, persyaratan modal minimum, akuisisi dan penggunaan tanah, tindakan perpajakan, dan persyaratan kewarganegaraan.</p>	
	<p>3) Akuisisi dan penggunaan lahan: sesuai dengan Peraturan Tanah Thailand, warga negara asing atau perusahaan domestik yang dianggap orang asing tidak diperbolehkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka bisa menyewa tanah dan bangunan sendiri.</p> <p>3.1 dan 3.2, orang perseorangan atau orang yuridis dari anggota lain yang memperoleh atau memperoleh</p>	<p>3) Dewan direksi, termasuk posisi administratif dan eksekutif atau sejenisnya di badan hukum harus berasal dari Thailand dan memiliki domisili permanen di Thailand. Orang atau wakil orang yuridis yang mengajukan permohonan lisensi harus memiliki kewarganegaraan Thailand.</p> <p>3.1 dan 3.2 orang alami atau orang yuridis yang menerima hak istimewa atau insentif khusus dari pihak</p>	

	<p>kepemilikan tanah, dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak dan hak istimewa berdasarkan perjanjian ini.</p>	<p>berwenang Thailand selain yang diberikan berdasarkan perjanjian ini tidak dapat mengklaim manfaat berdasarkan perjanjian ini.</p>	
--	---	--	--

THAILAND — DAFTAR PENGECEUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Layanan bisnis - Jasa auditing - Media Cetak	Kesepakatan bilateral berdasarkan hubungan timbal balik	Negara-negara yang mengizinkan warga negara Thailand untuk melakukan audit di wilayah mereka.	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
	Thailand akan memberikan izin kepada orang perseorangan dari negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Thailand	Negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Thailand	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Hanya perusahaan angkutan udara/mitra CRS yang berada dalam system Amadeus yang dapat membawa dan memasang system mereka sendiri di Thailand	Negara-negara operator CRS yang berada dalam sistem Amadeus dan yang dapat melakukan dan menginstal sistem ke agen perjalanan manapun di Thailand	Tidak ditentukan	Untuk memastikan bahwa operator lokal dapat mengakses sepenuhnya sistem Amadeus dalam jangka waktu tertentu
Jasa Tranportasi - Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Laut - Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	Pajak pertambahan nilai yang digunakan terdiri dari tiga tingkat, yaitu 10 %, 0% dan dikecualikan. Koleksi PPN didasarkan atas hubungan timbal balik.	- Negara-negara yang memiliki sistem PPN nol tarif sama seperti Thailand. - Negara-negara yang mengecualikan orang Thailand dari PPN atau pajak lainnya dengan sifat yang sama berdasarkan perjanjian yang disepakati atau disimpulkan dengan	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik

		<p>Thailand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara-negara yang membebaskan orang-orang hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Thailand dari PPN atau pajak lainnya yang sejenis dengan dasar timbal balik. - Negara-negara yang tidak memungut PPN atau pajak lainnya yang serupa sifatnya dengan orang yang memiliki kedudukan dalam hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Thailand berdasarkan timbal balik 		
Angkutan kargo maritim internasional	1) Hak untuk membawa semua produk: Perjanjian hubungan baik dan Hubungan Ekonomi antara Kerajaan Thailand dan Amerika Serikat	- USA	10 Tahun	Persetujuan Bilateral
	2) Kargo <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Navigasi Laut Komersil antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Sosialis 	- Pemerintah Republik Sosialis Vietnam	10 Tahun	Persetujuan Bilateral

	Vietnam			
	Kesepakatan Angkutan Maritim antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Rakyat China	- RRC	10 Tahun	Persetujuan Bilateral
Jasa Angkutan angkutan darat <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan penumpang - Angkutan Kargo - Rental non kendaraan komersial dengan/ tanpa supir 	Perlakuan secara Timbal balik	- Negara yang memiliki kesepakatan angkutan udara internasional dengan Thailand	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	Thailand akan memberikan izin kepada perusahaan penerbangan dari negara-negara yang memperlakukan operator Thailand secara timbal balik	<ul style="list-style-type: none"> - Negara-negara yang perusahaan penerbangannya diterima sebagai perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Thailand berdasarkan perjanjian hubungan angkutan udara bilateral - Negara-negara yang peraturannya tidak mencegah maskapai penerbangan Thailand 	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik

		melakukan kegiatan serupa di negara tersebut		
Sektor jasa yang diatur dalam pasal-pasal yang relevan dari Perjanjian Hubungan Ekonomi terutama Pasal 4 dan 10	Hanya warga negara Amerika dan entitas yang diberi perlakuan nasional sehubungan dengan operasi bisnis dan penyediaan layanan di Thailand	- USA	10 Tahun	Persetujuan Bilateral

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara - Pesawat Udara (termasuk semua mesin yang mendorong reaksi pergerakan di atmosfer kecuali untuk barang yang dikecualikan dalam Peraturan Menteri) - Komponen Utama Pesawat Udara (mesin, baling-baling dan komponen pesawat udara lainnya yang ditentukan oleh Komisi Teknik) - <i>Technical Standard Order Article/TSO Article</i> (sebuah instrumen, mekanisme, bagian, peralatan dan komponen yang digunakan atau akan digunakan dalam mengoperasikan atau pengaturan pesawat udara pada saat terbang, baik yang telah terpasang pada pesawat udara, di luar atau di dalam) - Bagian pesawat (sebuah rangka pesawat, bagian dari angka pesawat atau bagian dari Komponen Utama Pesawat Udara)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Perawatan Pesawat Udara: Sebagaimana tercantum di 3.3 dalam bagian horisontal (b) Perawatan peralatan pesawat udara utama sebagaimana <i>TSO Article</i> dan Perawatan pesawat udara: Sebagaimana tercantum di 3.1 dalam bagian horisontal (c) Penyedia layanan harus melakukan layanan mereka di luar apron yang ditentukan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	<p>1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional.</p> <p>(b) Jasa aplikasi radio tunduk pada ketersediaan frekuensi.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal</p> <p>(b) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional dan harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Komitmen Paket Ketujuh Thailand bidang jasa telekomunikasi dalam AFAS.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak mengikat</p>	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Penumpang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal (b) ditunjuk sebagai pemilik atau operator bandar udara belisensi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan:
1) Pasokan Lintas Batas
2) Konsumsi di Luar Negeri
3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tiak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tidak termasuk Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak ada	3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Presentasi komersial dari pemasok/penyedia jasa asing diperbolehkan sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	



**PROTOCOL TO IMPLEMENT THE
NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS
ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER
THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "ASEAN" or "Member States" or singularly "Member State");

NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services amongst Member States, eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States and liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organisation (hereinafter referred to as "WTO");

HAVING carried out seven rounds of negotiations and concluded eight sets of schedule of specific commitments embodied in the Protocol to Implement the Initial Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1997 in Kuala Lumpur, Malaysia; the Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam;

the Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 31 December 2001; the Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 23 November 2004 in Phnom Penh, Cambodia; the Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 8 February 2007 in Bangkok, Thailand; the Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 10 December 2009 in Ha Noi, Viet Nam; the Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 16 December 2011 in Phnom Penh, Cambodia; and the Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 20 December 2013 in Pakse, Lao PDR;

NOTING the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors together with the Roadmap for the Integration of Priority Sectors signed by the ASEAN Leaders on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, and the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors signed by the ASEAN Economic Ministers on 8 December 2006 in Cebu, Philippines, which includes Air Transport, provide measures to deepen and broaden internal economic integration and linkages, with the participation of the private sector, to realise an ASEAN Economic Community;

NOTING the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons signed by the ASEAN Economic Ministers during the 21st ASEAN Summit on 19 November 2012 in Phnom Penh, Cambodia that will facilitate the movement of ASEAN people in engaging in trade in goods, trade in services and investment in the region and that upon its entry into force, its

Annex 1 shall supersede commitments made under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) in relation to mode 4 (Movement of Natural Persons);

MINDFUL of the targets and timelines of the ASEAN Economic Community Blueprint adopted at the 13th ASEAN Summit held on 21 November 2007 in Singapore that, amongst others, provided for the liberalisation of trade in services through consecutive rounds of liberalisation ending in 2015;

HAVING carried out subsequent negotiations pursuant to Article IV of the ASEAN Framework Agreement on Services and finalised the Ninth Package of Commitments;

DESIRING to set out in a schedule, the specific commitments that each Member State shall undertake, for which Member States shall accord preferential treatment to one another on a Most-Favoured Nations basis,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. The Annexes to this Protocol shall consist of the consolidated schedules of each Member State's specific commitments, Schedules of Horizontal Commitments, and the Lists of Most-Favoured Nation Exemptions, which shall form an integral part of this Protocol.

2. Subject to each Member State's Schedules of Specific Commitments and the Lists of Most-Favoured Nation Exemptions, Member States shall accord preferential treatment in air transport services to one another on a Most-Favoured-Nation basis.

3. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the ASEAN Framework Agreement on Services.

4. This Protocol and the commitments set out in its Annexes shall enter into force on the sixtieth day after the

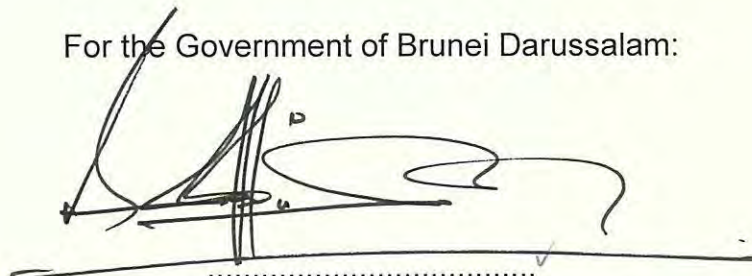
deposit of the seventh Instrument of Ratification or Acceptance from ASEAN Member States with the Secretary-General of ASEAN, and shall become effective only among the Member States that have ratified or accepted it. For each Member State ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the seventh Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit by such Member State of its Instrument of Ratification or Acceptance.

5. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State. The Secretary-General of ASEAN shall also promptly furnish notifications of ratifications or acceptances made pursuant to paragraph 4 to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.

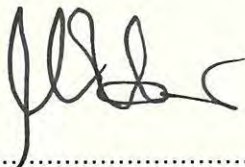
DONE at Kuala Lumpur, Malaysia, this 6th Day of November in the Year Two Thousand and Fifteen in a single original copy in the English Language.

For the Government of Brunei Darussalam:

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.

DATO MUSTAPPA SIRAT
Minister of Communications

For the Government of the Kingdom of Cambodia:



.....
MAO HAVANNALL
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Government of the Republic of Indonesia:



.....
IGNASIUS JONAN
Minister of Transport

For the Government of the Lao People's Democratic Republic:



.....
BOUNCHANH SINTHAVONG
Minister of Public Works and Transport

For the Government of Malaysia:



.....
DATO' SRI LIOW TIONG LAI
Minister of Transport

For the Government of the Republic of the Union of Myanmar:



HAN SEIN

Deputy Minister for the Ministry of Transport

For the Government of the Republic of the Philippines:



JOSEPH EMILIO AGUINALDO ABAYA

Secretary of Transportation and Communications



DOTC-OSEC OUTGOING 15-02604

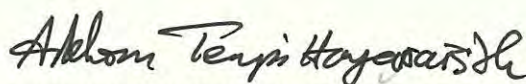
For the Government of the Republic of Singapore:



KHAW BOON WAN

Coordinating Minister for Infrastructure and Minister for Transport

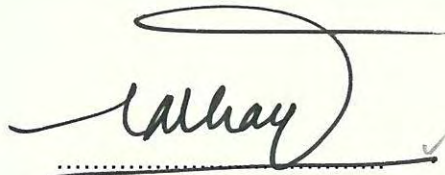
For the Government of the Kingdom of Thailand:



ARKHOM TERMPITTAYAPASITH

Minister of Transport

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:



DINH LA THANG
Minister of Transport

BRUNEI DARUSSALAM – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	3 Unbound for measures concerning foreign equity or interest in companies established or wishing to establish a commercial presence unless otherwise specified in the specific commitments.	3 With respect to existing commercial presence: - One of the 2 directors or where there are more than 2 directors at least 2 of them shall be ordinarily resident in Brunei Darussalam. - All companies incorporated outside Brunei Darussalam which establish or have established a place of business in Brunei Darussalam must have one or more locally resident agents to accept service of process and any service of process or any notices required to be served on the company.	
	4 Unbound except for measures concerning the entry and temporary presence of intra-corporate transferees at the level of managers, executives and specialists. Intra-corporate transferees refers to managers, executives and specialists, as defined below, who are employees of firms that provides services within Brunei Darussalam through a branch, subsidiary, or affiliate established in Brunei Darussalam and who have been in the prior employ of their firms outside Brunei Darussalam for a period of not less than one year	4 Unbound except for measures concerning the categories of natural persons referred to in the market access column.	



BRUNEI DARUSSALAM – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p>immediately preceding the date of their application for admission and who are one of the following:</p> <p>(a) Managers - persons within an organisation who primarily direct the organisation, or a department or sub-division of the organisation, supervise and control the work of other supervisory, professional or managerial employees, have the authority to hire and fire or commend hiring, firing or other personnel actions (such as promotion or leave authorisation), and exercise discretionary authority over day-to-day operations. Does not include first-line supervisors, unless the employees supervised are professionals, nor does it include employees who primarily perform tasks necessary for the provision of the service.</p>		



BRUNEI DARUSSALAM – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p>(b) Executives - persons within the organisation who primarily direct the management of the organisation, exercise wide latitude in decision-making and receive only general supervision or direction from higher-level executives, the board of directors, or stockholders of the business. Executives would not directly perform tasks related to the actual provision of the service or services of the organisation.</p> <p>(c) Specialists - persons within an organisation who possess knowledge at an advanced level of expertise and who possess proprietary knowledge of the organisation's service, research equipment, techniques, or management. (Specialists may include, but are not limited to, members of licensed professions)</p> <p>Entry for these intra-corporate transferees is limited to a three year period that may be extended for up to two additional years for a total term not to exceed five years.</p>		



BRUNEI DARUSSALAM – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
All Sectors	Future liberalisation of measures affecting limitations on foreign equity or interest in companies established in Brunei Darussalam shall be carried out in a differentiated manner, and at the discretion of the relevant authorities.	All Countries	Indefinite	The measure would be applied in a differentiated manner to those investment that match Brunei Darussalam's specific development requirements with the abilities and facilities provided by foreign enterprises and their home countries. The objective is to maximise economic benefits of foreign participation in the Brunei Darussalam economy.
	Preferences for entry and temporary stay of workers from traditional sources of supply.	Traditional sources	Indefinite. Brunei Darussalam will periodically review this in the light of domestic and national policy considerations.	Due to the small population base the government needs to regulate the flow of foreign workers, both skilled and unskilled, to ensure social cohesion in Brunei Darussalam.



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity	1) None 2) None 3) Unbound	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity	1) None 2) None 3) Unbound	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity	1) None 2) None 3) Unbound	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity	1) None 2) None 3) Unbound	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Airfreight Forwarding Services	1) None 2) None 3) Up to 51% foreign equity	1) None 2) None 3) Unbound	



CAMBODIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
Subsidies		(3), (4). Unbound for subsidies, including for research and development	
Tax measures		(1), (2), (3) None with respect to taxes	
Land		(3) Non-Cambodian natural and juridical persons may lease but not own land.	
Acquired rights	The conditions of ownership, management, operation, juridical form and scope of activities as set out in a license or other form of approval establishing or authorising the operation or supply of services by an existing foreign service supplier, will not be made more restrictive than those in existence as of the date of Cambodia's accession to the WTO.		
Investment incentives	(3) Investors, seeking incentives under the provisions of the Law on Investment, shall have the obligation to provide adequate and consistent training to Cambodian staff, including for promotion to senior positions.	(3) None	



CAMBODIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Presence of natural persons	<p>(4) Unbound except for measures concerning the entry and temporary stay of a natural person who falls in one of the following categories:</p> <p><u>Business visitors</u></p> <p>A natural person who:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enters Cambodia for the purposes of participating in business meetings, establishing business contacts including negotiations for the sale of services and/or other similar activities; - stays in Cambodia without receiving income from within Cambodian sources; - does not engage in making direct sales to the general public or supplying services. <p>Entry visa for business visitors shall be valid for a period of 90 days for an initial stay of 30 days, which may be extended.</p>	<p>(4) Unbound, except for measures affecting the categories referred to under market access.</p>	



CAMBODIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply:

1) Cross-border supply

2) Consumption abroad

3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p><u>Persons responsible for setting up of a commercial establishment:</u> Persons working in an executive or managerial position, receiving remuneration from an entity as defined below, who are responsible for the setting up, in Cambodia, of a commercial presence of a service provider of a Member, that will support employment of persons described in a, b, and c below. The subject persons are not subject to a maximum duration of stay.</p> <p><u>Intra-Corporate Transferees</u> Natural persons who have been employed by a juridical person of another member for a period of not less than 1 year and who seek temporary entry to provide services through a branch, subsidiary and affiliate in Cambodia and who are:</p> <p>a) <u>Executives:</u> without requiring compliance with labour market tests, persons within an organisation who primarily direct the management of the organisation, exercise wide latitude in decision-making, and receive only general supervision or direction from higher-level executives, the board of directors, or shareholders of the</p>		



CAMBODIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply:

1) Cross-border supply

2) Consumption abroad

3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p>business. Executives would not directly perform tasks related to the actual supply of a service or services of the organisation.</p> <p>b) <u>Managers</u>: without requiring compliance with labour market tests, natural persons employed by a juridical entity and who possess knowledge at an advanced level of expertise or proprietary knowledge of a juridical entity product, service, research, equipment, techniques, or management, and who primarily direct the organisation or a department of the organisation; supervise and control the work of other supervisory, professional or managerial employees; have the authority to hire and fire or recommend hiring, firing or other personnel actions; and exercise discretionary authority over day-to-day operations. They do not include first-line supervisors, unless the employees supervised are professionals, nor do they include employees who primarily perform tasks necessary for the supply of the</p>		



CAMBODIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p>service.</p> <p>c) <u>Specialists</u>: Natural persons, within an organisation who possess knowledge at an advanced level of continued expertise and who possess proprietary knowledge of the organisation's services, research equipment, techniques, or management.</p> <p>Temporary residency and work permit is required for the natural persons in the categories defined under intra-corporate transferees. Such permits are issued for two years and may be renewed annually up to maximum of total five years.</p>		



CAMBODIA– LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Audiovisual services				
Production and distribution of television programmes and cinematographic works	Measures based upon co production agreements of audiovisual works, which confer National Treatment to audiovisual works covered by such agreements.	Countries with which such bilateral or plurilateral agreements are in force, now or in the future	Indefinite	The aim of these agreements is to promote cultural links between the countries concerned
Production and distribution of television programmes and cinematographic works	Measures granting the benefit of support programmes (such as "Fonds d'aide a la production de l'agence intergouvernemental de la Francophonie") to audiovisual works, and suppliers of such works meeting origin criteria.	Countries with which bilateral and plurilateral agreements have been signed in the area of cultural cooperation.	Indefinite	These programmes aim at preserving and promoting the cultural identity of countries with which Cambodia has a long-standing cultural links
Production and distribution of audiovisual works through broadcasting transmission to the public	Measures which extend National Treatment to audiovisual works which meet certain origin criteria regarding access to broadcasting transmission.	Countries with which bilateral or plurilateral agreements concluded in the area of cultural cooperation.	Indefinite	These measures aim, within the sector, to promote cultural values both within Cambodia, and with other countries, including in the region
Land transport	Facilitation of transport and transit transport agreements.	Existing and future bilateral or plurilateral agreements	Indefinite	The need to promote tourism and trade in transport services especially among the neighbouring countries.



CAMBODIA– LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Internal waterways	Establishes procedures, charges, and specific regulations applicable for ships of countries concerned operating in Mekong river basin	Existing and future bilateral or plurilateral agreements	Indefinite	Ensure and facilitate navigation in the Mekong river.
Maritime transport	Establishes procedures, charges, and specific regulations for maritime transport applicable for ships of countries concerned operating in Siam Gulf.	Existing and future bilateral or plurilateral agreements	Indefinite	Ensure and facilitate navigation in the Siam Gulf.



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) None, other than that indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) None, other than that indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) None other than that indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Catering Services	1) None 2) None 3) None other than that indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Refueling Services	1) None 2) None 3) None other than that indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Line Maintenance	1) None 2) None 3) None other than that indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



INDONESIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	<p>3) Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise.</p> <p>Joint venture should meet the following requirements:</p> <p>(i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</p> <p>(ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s).</p>	<p>3) The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source:</p> <p>(a) interest</p> <p>(b) royalties</p> <p>(c) dividend</p> <p>(d) fee from service performed in Indonesia</p> <p>The tax rate can be changed due to tax treaty.</p> <p>Land Acquisition</p> <p>Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property.</p> <p>Any juridical and natural persons should meet professional qualification requirements.</p>	



INDONESIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p>4) Subject to Indonesian Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/advisors, unless mentioned otherwise, are allowed to stay for two years and could be extended for a maximum two times subject to two years extension each time. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test.</p> <p>The entry and temporary stay of business visitor(s) is (are) permitted for a period of 60 days and could be extended maximum for 120 days.</p>	<p>4) Expatriate Charges Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by Governments</p> <p>Labour Laws and Regulations. Any expatriate employed by a joint-venture enterprise, representatives office, and/or other types of juridical person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by the Ministry of Manpower and Transmigration.</p>	



INDONESIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments ON Air Transport under the ASEAN Framework Agreement on Services

Definitions:

"Director": One or a group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entity with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court.

"Manager": Senior employee of a service supplier who primarily directs the management of the organisation, receiving general supervision or direction principally from the board of directors of the business, including directing the service supplier or a department or sub-division thereof, supervising or controlling the work of other supervisory, professional or managerial employee or having the authority to hire or fire or recommend such or other personnel actions.

"Technical Expert/Advisor": Person employed by a service supplier who possesses a standard of high or common (i) qualifications referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge or (ii) knowledge essential or proprietary to the service, research equipment, techniques or management.

"Joint Operator": A joint operation is an undertaking between one or several foreign and Indonesian enterprises of temporary nature, to handle one or several project/businesses without establishing a new statutory body according to Indonesian laws

"Joint venture Enterprise": A joint venture enterprise is a legal entity organised under Indonesian law and having its domicile in Indonesia, in the form of cooperation between foreign capital and Indonesian (national) capital.

"Contract Management": Contract management is a contract organised under Indonesian law in the form of cooperation on management of temporary nature between Indonesian (national) capital and foreign capital.

"Business visitors(s)": natural person(s) staying in Indonesia for the purpose of participating in business meeting, business contacts including negotiations for the sales of services and/or other similar activities including those who prepare for the establishment of a commercial presence in Indonesia, without acquiring remuneration and/or any other direct income from within Indonesia, and are not engaged in making direct sales or supplying services to general public.



INDONESIA – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Banking Services *	Measures relating to a joint-venture bank of national and foreign origin under which entry of foreign bank in Indonesia is allowed on a reciprocity basis (Pursuant to Articles 14(3) the Ministry of Finance Decrees No. 220/KMK.017/1993 dated 26 th February 1993) With respect to joint-venture banks, licenses can only be granted to foreign banks of countries which adopt reciprocal policies regarding Indonesian banks	All countries which adopt reciprocal policies regarding Indonesia banks	Suspended until the end of the period of 60 days beginning on 1 November 1997 as stipulated in the Second Decision on Financial Services adopted by the Council for Trade in Services on 21 July 1995	To guarantee equal treatment to Indonesian nationals wishing to establish and operate bank abroad
Movement of Personnel (semi-skilled workers)	Low level occupations are reserved for Indonesian citizens. Based on Government Policy, limited exemptions may be granted to citizens of certain countries.	Nationals of Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Papua New Guinea and Australia have been granted limited access to low level occupations	Indefinite	Development of the region is being undertaken and for the confirmation of this programme, it is decided to grant limited access to low level occupations to citizens at a limited number of countries
Construction Services (government funded projects)	Measures relating to preferential short listing in international competitive bidding	Nationals of Brunei Darussalam, Malaysia, The Philippines, Singapore and Thailand have been granted special treatment	These measures shall be maintained as long as the treaties of ASEAN remain in force	The implementation of a preferential short listing scheme for ASEAN contractors enhances the advancement of civil works, industrial construction and the economic development of the ASEAN region

Note: *) This exemption is removed as a GATS Plus Offer



INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) Should be in the form of limited liability enterprise with maximum foreign equity 49%	(1) None (2) None (3) As indicated in the horizontal section	



INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) Should be in the form of limited liability enterprise with maximum foreign equity 49%	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) Should be in the form of limited liability enterprise with maximum foreign equity 49%	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) Commercial presence of foreign service supplier and/or providers is permitted up to 49%	1) None 2) None 3) None	



INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) Should be in form of limited liability enterprise with maximum foreign equity 49%	1) None 2) None 3) As indicated in horizontal section	



LAO PDR – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	<p>3) Commercial presence of foreign service suppliers can be in the following form:</p> <ul style="list-style-type: none"> - joint venture with one or more domestic Lao investors, - wholly foreign-owned enterprise¹ - branch or representative office <p>A company is considered a joint venture when it has at least 10% foreign equity.</p> <p>The commercial presence of foreign service suppliers is subject to approval by the concerned competent authorities. Enterprises with foreign capital require an investment license, which sets out the terms of operation, and a business cooperation contract.</p>	<p>3) Foreign service suppliers in the Lao PDR may lease land within the Lao PDR and transfer their leasehold interest. They may own improvements on land and other moveable property and transfer those ownership interests.</p> <p>Foreign investors shall provide adequate training opportunities to Lao PDR nationals.</p> <p>Tax measures, generally pertaining to small and medium enterprises may result in a difference of treatment in favour of Lao PDR services and service suppliers.</p>	

¹ 100% foreign invested Companies



LAO PDR - LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Computer Reservation Systems	Market Access and national treatment are on reciprocal basis, and on the provisions of the bilateral Air Services Agreement	<p>All countries with whom Laos has signed agreements on bilateral air services, currently they are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia - Malaysia - Cambodia - Singapore - Myanmar - Vietnam - China - Thailand 	Expiry date or termination of the bilateral agreements on air services. This will be reviewed for purpose of further development	Reciprocal basis and/or bilateral agreement
Auditing Services	Bilateral agreement based on reciprocity treatment	Countries in which related services can be supplied by Lao nationals.	Indefinite	Reciprocal basis
Publishing Newspaper	Permission granting has to be based on bilateral agreement	Countries which have agreements with Laos	Indefinite	Reciprocal basis



LAO PDR - LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Legal services		All countries	Indefinite	Can be approved on case by case approval
Banking and other financial services	Measures affecting the supply of banking and other financial services to be granted on a bilaterally favorable basis with countries Laos has agreements	All countries	Indefinite	For reciprocity purpose, and the financial stability



LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) Can be in the following forms: <ul style="list-style-type: none"> • A joint venture with one or more domestic Lao investors; • A wholly foreign-owned enterprise (100% foreign invested companies) • A branch or representative office <ol style="list-style-type: none"> a) to be approved by Government competent authority prior to licensing by Foreign Investment Management Committee b) Foreign equity not less than 30% (for joint venture) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 	



LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) Can be in the following forms: <ul style="list-style-type: none"> • A joint venture with one or more domestic Lao investors; • A wholly foreign-owned enterprise (100% foreign invested companies) • A branch or representative office a) to be approved by Government competent authority prior to licensing by Foreign Investment Management Committee b) Foreign equity not less than 30% (for joint venture)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Airfreight forwarding services (CPC 74800)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Catering Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Line Maintenance	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Refueling Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Cargo Handling Services (CPC 741)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section	



MALAYSIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE UNLESS OTHERWISE INDICATED		<p>3) <u>Land, Property and Real Estate</u></p> <p>Approval may be denied if the acquisition, disposal or dealing of land or any interest in land, property and real estate is undertaken for speculative or non-productive purpose or for purposes which may conflict with the interest of the State.</p> <p><u>Incentives/Preferences</u> Incentives are limited to eligible Malaysian-owned corporations engaged in service sectors promoted by the Government.</p> <p>Any measure and special preference granted to Bumiputera, Bumiputera status companies, trust companies and institutions set up to meet the objectives of the New Economic Policy (NEP) and the National Development Policy (NDP) shall be unbound.</p>	



MALAYSIA – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
		Corporations in which the Government has an interest shall, in acquiring services, give first consideration to service suppliers in which the Government has an interest. This requirement does not prevent the acquisition of services from other service suppliers where their services are competitive in terms of price, quality and delivery.	



MALAYSIA - LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
All Sectors	Liberalisation of measures affecting movement of foreign semi-skilled and unskilled workers into Malaysia may be carried out in a differentiated manner based on reasons including proximity, either contiguous or regional, religious and/or cultural compatibility	All countries	Indefinite	<p>The measure is required to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maintain the arrangements under existing bilateral agreements; and - ensure that the movement of foreign semi-skilled and unskilled workers contributes to the social stability and industrial harmony in Malaysia
All Sectors	Liberalisation of Measures in existing or future policies limiting foreign equity or interests in companies and businesses in Malaysia shall be carried out in a preferential and differentiated manner	All countries	Indefinite	<p>The measure would be applied in a differentiated manner to those investments that match Malaysia's specific development requirements with the abilities and facilities provided by foreign enterprises and their home countries. The objective is to maximise economic benefits of foreign participation in the Malaysian economy.</p>



MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross Border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound	



MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross Border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross Border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross Border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) Foreign equity participation shall not exceed 49%	1) None 2) None 3) None	



MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross Border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) Foreign equity participation shall not exceed 49%	1) None 2) None 3) None	

MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross Border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Line Maintenance	1) None 2) None 3) Foreign equity participation shall not exceed 49%	1) None 2) None 3) None	



MYANMAR – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply:		1) Cross-border supply	2) Consumption abroad	3) Commercial presence										
Sector or Subsector	Limitation on Market Access		Limitation on National Treatment	Additional Commitments										
I. HORIZONTAL COMMITMENTS														
Air Transport Sector; For a service supplier of another Party who is natural person of that Party but is not national of that Party in mode 1, 2, 3, 4: unbound														
Air Transport Sector	3) (a)	<p>Commercial presence of foreign service suppliers and/or providers are permitted in accordance with Myanmar Companies Act 1914, Partnership Act 1932, the Special Companies Act 1950, the Foreign Investment Law (2012), the Foreign Investment Rules (2013), Existing Notifications of Myanmar Investment Commission and Myanmar Citizens' Investment Law (2013).</p> <p>As stipulated in the Foreign Investment Law (2012), the investment may be carried out in any of the following forms:</p> <p>(i) carrying out an investment by a foreigner with one hundred per cent foreign capital on the business permitted by the Commission;</p> <p>(ii) carrying out a joint venture between a foreigner and a citizen or the relevant Government department and organization;</p> <p>(iii) carrying out by any system contained in the contract which approved by both parties.</p> <p>The proposed investment may be refused subject to such implications as financial arrangements security risk involved and compliance with existing conditions.</p>	3) (a)	<p>According to the Notification No.167/2011, Non-resident Foreigner will be subject to a withholding tax as follows;</p> <table><tr><th>Class of Income</th><th>Non-resident foreigners</th></tr><tr><td>▪ Interest</td><td>15%</td></tr><tr><td>▪ Royalties paid for the use of licenses, trademarks, patent rights etc.</td><td>20%</td></tr><tr><td>▪ Payments of contracts and buying goods within Myanmar and, by the consistent contracts, agreement or any kinds of agreement, performed for State organizations, city development committees, cooperative societies, companies registered and non-government organizations.</td><td>3.5 %</td></tr><tr><td>▪ Payments of contracts and buying goods inside Myanmar by the consistent contracts or agreement performed for the un-registered foreign entitles and foreign companies.</td><td>3.5%</td></tr></table>	Class of Income	Non-resident foreigners	▪ Interest	15%	▪ Royalties paid for the use of licenses, trademarks, patent rights etc.	20%	▪ Payments of contracts and buying goods within Myanmar and, by the consistent contracts, agreement or any kinds of agreement, performed for State organizations, city development committees, cooperative societies, companies registered and non-government organizations.	3.5 %	▪ Payments of contracts and buying goods inside Myanmar by the consistent contracts or agreement performed for the un-registered foreign entitles and foreign companies.	3.5%
Class of Income	Non-resident foreigners													
▪ Interest	15%													
▪ Royalties paid for the use of licenses, trademarks, patent rights etc.	20%													
▪ Payments of contracts and buying goods within Myanmar and, by the consistent contracts, agreement or any kinds of agreement, performed for State organizations, city development committees, cooperative societies, companies registered and non-government organizations.	3.5 %													
▪ Payments of contracts and buying goods inside Myanmar by the consistent contracts or agreement performed for the un-registered foreign entitles and foreign companies.	3.5%													
			According to the 2014 Union Taxation Law, 'Income tax 35											



MYANMAR – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply:			
1) Cross-border supply			
2) Consumption abroad			
3) Commercial presence			
Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	<p>In forming the form of investment in Myanmar, it shall be formed as company in accord with existing law.</p> <p>(b) Incorporation of an enterprise, not involving a state enterprise is to be made under the Myanmar Companies Act 1914. If the investment involves a state enterprise, incorporation shall be made under the Myanmar Companies Act 1914, Partnership Act 1932, Special Companies Act 1950, Myanmar Companies (Amendment) Act 1955 and Myanmar Companies Regulations 1957.</p> <p>(c) Services activities are restricted under section 3 of the State-owned Economic Enterprises Law (1989). However, these activities may be permitted by Cabinet notification according to the section 4 of the said law.</p> <p><u>Tax</u> Under the section 27 of Foreign Investment Law promulgated on 2nd November 2012, the Myanmar Investment Commission shall, for the purpose of promoting foreign investments within the State, grant the investor the income tax exemption for a period of 5 consecutive years, inclusive of the year of commencement of production of goods or services. In addition, one or more than one or all of the remaining tax exemptions or tax reliefs may be granted if it is applied.</p>	<p>percent shall be assessed upon non-resident foreigner's total income before deduction of allowance prescribed by Income Tax Law Section 6 and 6 (a). If the income is in foreign currency, the income tax must be paid with that foreign currency.'</p> <p><u>Tax</u> According to the Sections 3 (k) of the Income Tax Law, it prescribes the resident foreigners as follows:</p> <p>(i) in the case of individual, a foreigner who resides in Myanmar for not less than one hundred and eighty-three days during the income year;</p> <p>(ii) in the case of a company, a company formed under the Myanmar Companies Act or any other existing law wholly or partly with foreigner share-holders;</p> <p>(iii) in the case of an association of persons other than a company, an association formed wholly or partly with foreigners and where the control, management and decision making of its affairs is situated and exercised wholly in the Republic of the Union of Myanmar.</p> <p>- In this regard, foreign workers and staff who work at least six months (183 days) in Myanmar and the foreign enterprises formed in Myanmar may be assumed as the resident foreigners.</p> <p>(b) A foreign lawyer may perform service to client in Myanmar but are not allowed to practice in Myanmar courts of law.</p> <p>(c) The commercial presence of foreign services provider shall be subject to the licensing by the government authorities concerned.</p>	



MYANMAR – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply:			
1) Cross-border supply		2) Consumption abroad	3) Commercial presence
Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
		(d) According to the Farm-Land Law 2012 and the Transfer of Immoveable Property Restriction Law 1987, the Law Amending the Transfer of Immoveable Property Restriction Law (2005), foreign organizations and persons are not allowed to own land in Myanmar. However, land may be acquired on long term lease, depending on individual circumstance.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Catering Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Line Maintenance Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Cargo Handling Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments.	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Ramp Handling Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Baggage Handling Services	<p>3) None</p> <p>4) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal commitments</p>	<p>3) None</p> <p>4) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal commitments</p>	



MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Passenger Handling Services	4) None 5) None 6) As indicated in the horizontal commitments	4) None 5) None 6) As indicated in the horizontal commitments	



PHILIPPINES – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply:			
(1) Cross-border supply		(2) Consumption abroad	(3) Commercial presence
Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	<p>3) <u>In Activities Expressly Reserved by Law to Citizens of the Philippines (i.e. foreign equity is limited to a minority share):</u></p> <p>The participation of foreign investors in the governing body of any corporation engaged in activities expressly reserved to citizens of the Philippines by law shall be limited to the proportionate share of foreign capital of such entities.</p> <p>All executive and managing officers must be citizens of the Philippines.</p> <p><u>Acquisition of Land</u></p> <p>All lands of the public domain are owned by the State.</p> <p>Only citizens of the Philippines or corporations or association at least 60 per cent of whose capital is owned by such citizens may own land other than public lands and acquire public lands through lease.</p> <p>Foreign investors may lease only private-owned lands.</p>	<p>3) <u>Access to Domestic Credit</u></p> <p>A foreign firm, engaged in non-manufacturing activities availing itself of peso borrowings, shall observe, at the time of borrowing, the prescribed 50:50 debt-to-equity ratio. Foreign firms covered are:</p> <p>a) Partnerships, more than 40 per cent of whose capital is owned by non-Filipino citizens; and</p> <p>b) Corporations, more than 40 per cent of whose total subscribed capital stock is owned by non-Filipino citizens.</p> <p>This requirement does not apply to banks and non-bank financial intermediaries.</p>	



PHILIPPINES - LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
ALL SECTORS				
Entry and temporary stay of natural persons supplying services	<p>A special visa category is provided for traders and investors of countries with which the Philippines has concluded treaties on entry rights for traders and investors</p> <p>Under this special category, the labor market test is waived and simplified entry procedures are provided</p>	All countries	Expiry date or termination of bilateral treaties on entry rights for traders and investors	To facilitate entry into the Philippines, on the basis of reciprocity, of foreign nationals for purposes of trade, investment and related activities
<u>Maritime Transport Services</u>				
Liner cargo trade	<p>Executive Order 769 provides for a preferential cargo sharing arrangement with countries which are parties to the UNCTAD Liner Code</p> <p>Under the above-mentioned arrangement, a Party to the UNCTAD Liner Code effectively implementing the Code is assured of at least 40 per cent share of its bilateral export and import liner cargo trade with the Philippines</p>	All countries which have acceded to the UNCTAD Liner Code	Indefinite	Ensure effective participation of Philippine ocean-going fleet in Philippine liner cargo trade



PHILIPPINES - LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Cabotage transport	<p>Access to domestic shipping is reserved for Philippine owned or registered vessels</p> <p>However, limited access to domestic shipping is granted to countries with which the Philippines has concluded agreements on Amity, Commerce and Navigation</p>	All countries	Expiry date or termination of bilateral agreements on Amity, Commerce and Navigation	Allow limited access to cabotage transport on a reciprocal basis
<u>Banking and Other Financial Services</u> (including insurance)	With respect to the granting of authorisation for the establishment of commercial presence or expansion of existing operations in Financial Services in the Philippines, favourable treatment would be accorded, on a discretionary basis, to financial service suppliers of another Member that accords favourable treatment to financial service suppliers of the Philippines	All countries	Indefinite	To promote greater liberalisation in financial services between the Philippines and other Members in a manner that would contribute to the attainment of Philippine development objectives in the financial sector



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft repair and maintenance	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None, except for on-line carriers and its agents subject to: a. Minimum capital requirements b. Maximum 40% equity ownership; and c. Surety bond requirement 2) None 3) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft leasing with crew	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None (Lease agreement subject to approval of the aeronautical authority) 2) None (Lease agreement subject to approval of the aeronautical authority) 3) None	1) None (Lease agreement subject to approval of the aeronautical authority) 2) None (Lease agreement subject to approval of the aeronautical authority) 3) None	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Airfreight forwarding services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Cargo handling	1) Unbound * 2) None 3) None	1) Unbound * 2) None 3) None	

*Due to technical feasibility



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Baggage handling	1) Unbound * 2) None 3) None	1) Unbound * 2) None 3) None	

*Due to technical feasibility



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Passenger handling	1) Unbound * 2) None 3) None	1) Unbound * 2) None 3) None	

*Due to technical feasibility



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft catering services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Line Maintenance	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
8th Round of Negotiation – 9th Package

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft repair and maintenance (improvement)	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



SINGAPORE – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE		<p>3) Commercial presence, right of establishment and movement of juridical persons are subject to compliance with the following provisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A foreigner who wishes to register a business firm must have a local manager who should be a Singapore citizen or a Singapore Permanent Resident or a Singapore Employment Pass holder. (However, a foreigner who is a Singapore Permanent Resident or a Singapore Employment Pass holder can register a business without appointing a local manager.) - At least one director of the company must be locally resident - All branches of foreign companies registered in Singapore must have at least 2 locally resident agents. (To qualify as locally resident, a person should be either a Singapore citizen or Singapore Permanent Resident or Singapore Employment Pass holder.) 	



SINGAPORE – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	1), 2), 3) Specific commitments in market access in any sector or sub sector, through any mode of delivery, shall not be construed to override the limitations established in the financial services sector	1), 2), 3) Unbound for subsidies except for specific commitments contained in WTO document GATS/SC/76 (15 April 1994), GATS/SC/76 Suppl.2 (11 April 1997) and GATS/SC/76 Suppl.3 (26 Feb 1998).	



SINGAPORE – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
<p>All Sectors: Presence of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unskilled and semi-skilled natural persons - skilled persons (include craftsmen skilled in a particular trade, but exclude specialists/professional personnel at management level) 	Preference for workers from traditional sources of supply	Traditional sources	<p>Indefinite</p> <p>Singapore will periodically review this in the light of domestic and national policy considerations</p>	Due to land constraints and the fundamental need for social cohesion among the multi-racial population, the Government needs to regulate the flow of foreign workers, both skilled and unskilled, to ensure that Singapore is not overpopulated and foreigners who could potentially disrupt social order are not admitted
All sectors: Investment Guarantee Agreements (IGAs)	Investment guarantee, i.e. obligations to protect foreign investments from unforeseen contingencies such as nationalisation, war, etc. are accorded only to co-signatories of Investment Guarantee Agreements	All countries.	<p>Indefinite</p> <p>Singapore will periodically review this in the light of international developments</p>	Currently, many countries' obligations to protect foreign investments from unforeseen contingencies are governed by the provisions established under bilateral investment guarantee agreements. The agreements also help to provide the economic and political guarantees for the promotion of bilateral relations



SINGAPORE – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
All Sectors: Commonwealth Tax Credit Scheme	Section 48 of the Income Tax Act provides for the granting of relief against Singapore tax payable on income derived from a Commonwealth country	Commonwealth countries which grant reciprocal relief	Indefinite Singapore will periodically review this in the light of international developments	This is part of Singapore's cooperation among Commonwealth members
Legal Services	All measures pertaining to the provision of legal services in Singapore	All countries	Indefinite Singapore will keep the possibility of removing this exemption under review	The exemption is necessary as the establishment of foreign law firms in Singapore is based on case-by-case approval
Broadcasting Broadcasting is defined to include: - Free-to-air broadcasting - Cable and pay television - Direct broadcast by satellite - Tele text - All broadcasting services listed in Services Sectoral Classification list, MTN.GNS/W/120	The Ministry of Information, Communications & The Arts, Singapore accords preferential broadcast and transmission rights to selected countries with which it has signed bilateral agreements	All countries.	Singapore will keep the possibility of removing this exemption under review	To promote social, economic and cultural relations



SINGAPORE – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Computer reservation systems	Market access and national treatment are based on reciprocity in mutual concessions, but not necessarily in the same areas, as established under bilateral Air Services Agreements	All countries.	Indefinite Singapore will periodically review this in the light of international developments	Currently, the conditions and level of market access granted in air transport services are primarily governed by other multilateral agreements and/or bilateral air services agreements. In addition, the "Annex on Air Transport Services" contained in the GATS currently has only limited application to measures affecting the air transport services sector.
Maritime Transport Services: - Storage and warehousing - Freight forwarding - Inland trucking - Container station and depot services	The undertaking of the commitments to bind the current level of market access and treatment to services and services supplier, in the 4 sub sectors will be through the conclusion of bilateral shipping agreements	All countries.	Indefinite Singapore will periodically review this in the light of international developments	Some of Singapore's trading partners do not accord Singapore companies satisfactory access to maritime transport services in their territories



SINGAPORE – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
FINANCIAL SERVICES¹ Banking and other financial services	<p>Under a currency inter-changeability agreement between Singapore and Brunei, the currency-issuing authorities of Singapore and Brunei would:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accept from banks, notes and coins issued by the other issuing authority, at par and without charge and to exchange such notes and coins into the currency of the country concerned; and - arrange for repatriation at the expense of the respective currency issuing authority, the notes and coins issued by the other currency issuing authority and to receive at par the equivalent in any agreed currency. 	Brunei	Indefinite, until either country terminates the agreement	The currency inter-changeability agreement was entered into in 1967 arising from special historical and economic ties between Singapore and Brunei

¹ Supplementary information provided for transparency

The Stock Exchange of Singapore (SES) and the Singapore International Monetary (SIMEX) have established trading linkages with the exchanges of some countries to facilitate the trading of securities and futures. The establishment of trading linkages is a commercial decisions of the SES and SIMEX



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services	1) None 2) None 3) Unbound Foreign equity participation of up to 70%	1) None 2) None 3) Unbound	



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) Unbound Foreign equity participation of up to 51%	1) None 2) None 3) Unbound	



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Unbound</p> <p>Foreign equity participation of up to 51%</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Unbound</p>	



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Cargo handling	1) Unbound * 2) None 3) Unbound	1) Unbound * 2) None 3) Unbound	

Due to lack of technical feasibility



THAILAND – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply

2) Consumption abroad

3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	<p>3) Commercial presence in sectors or subsectors in this schedule is permitted only through limited liability company which is registered in Thailand or the other type of legal entity as specified in the sector-specific commitments of which the company is incorporated and registered, pursuant to Thai laws and regulations and will have to meet one of the following condition as indicated in the sector-specific commitments:</p> <p>3.1 Foreign equity participation must not exceed 70 per cent of the registered capital and shall only operate through joint-venture with a juridical person of Thai national; or</p> <p>3.2 Foreign equity participation must not exceed 51 per cent of the registered capital and shall only operate through joint-venture with a juridical person of Thai national; or</p> <p>3.3 a. Foreign equity participation must not exceed 49 per cent of the registered capital; and</p> <p>b. The number of foreign shareholders must be less than half of the total number of</p>	<p>3) For 3.3, legal entity which is owned or controlled by foreigner(s) must meet the requirements as stipulated by laws and regulations regarding foreign investment.</p> <p>For 3.1 and 3.2, prior to obtaining a license or certificate, legal entity which is owned or controlled by foreigner(s) must meet the criteria required by relevant authorities.</p> <p>In establishing its commercial presence, a legal entity which is owned or controlled by foreigner(s) must apply for a certificate of business operation pursuant to a treaty or obligation under section XI of the Foreign Business Act; Ministerial Regulation Prescribing Rules and procedures Pertaining to the Application for a Foreign Business certificate B.E. 2546 (2003). According to article XIV and XIV bis of GATS, service supplier is required to comply with section V of the Foreign Business Act.</p> <p>For legal entity incorporated pursuant to Thai laws and regulations with foreign equity participation not exceeding 49 per cent of the</p>	



THAILAND – HORIZONTAL COMMITMENTS

For the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply

2) Consumption abroad

3) Commercial presence

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
	shareholders of the company concerned.	registered capital: None Unbound for the measures pertaining to subsidies or privileges, minimum capital requirements, acquisition and usage of land, taxation measures, and nationality requirement.	
	<p>3) Acquisition and usage of land: according to the Land Code of Thailand, foreign nationals or domestic companies which are deemed foreigners are not allowed to purchase or own land in Thailand. However, they may lease land and own buildings.</p> <p>For 3.1 and 3.2, a natural person or juridical person of another member that acquires or gains ownership of land, shall be deemed ineligible to exercise rights and privileges under this agreement</p>	<p>3) The board of directors, including administrative and executive position or alike in the legal entity must be of Thai national and have permanent domicile in Thailand. The person or the representative of the juridical person who apply for a license must be of Thai nationality.</p> <p>For 3.1 and 3.2 a natural person or a juridical person who receive other special privileges or incentives from Thai authorities other than those provided under this agreement may not claim benefits under this agreement.</p>	



THAILAND – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Business services	Bilateral agreement based on reciprocity treatment	Countries which allow Thai nationals to practise auditing in their territories	Indefinite	Reciprocal basis
- Auditing services				
- Publishing newspapers	Thailand will grant permission to a natural person of the countries which have treaties with Thailand	Countries which have treaties with the Thai Government	Indefinite	Reciprocal basis
Computer reservation system services	Only airlines/CRS partners which are in Amadeus system can bring in and install their own systems in Thailand	Countries whose CRS operators are in Amadeus system and intend to bring in and install the systems to any travel agencies in Thailand	Indefinite	To ensure that local operators are able to make complete access to the Amadeus system within a certain period of time
Transport services	The value added tax in use comprises three rates, namely 10 per cent, zero per cent and exempted. VAT collection is based on a reciprocal basis.	<ul style="list-style-type: none"> - Countries which have the same zero rate VAT system as Thailand - Countries which exempt Thai persons from VAT or other taxes of similar nature by virtue of the treaties concluded or to be concluded with Thailand 	Indefinite	Reciprocal basis
- Selling and marketing of maritime transport services				
- Selling and marketing of air transport services				



THAILAND – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
		<ul style="list-style-type: none"> - Countries which exempt juristic persons constituted in accordance with Thai law from VAT or other taxes of similar nature on the basis of reciprocity - Countries which do not levy VAT or other taxes of similar nature on juristic persons constituted in accordance with Thai law on the basis of reciprocity 		
International maritime transport of cargoes	1) Rights to carry all products: Treaty of Amity and Economic Relations between the Kingdom of Thailand and the United States of America	The United States of America	10 years	Bilateral agreement
	2) Cargo sharing - Commercial Maritime Navigation Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam	The Socialist Republic of Vietnam	10 years	Bilateral agreement



THAILAND – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
	- Agreement of Maritime Transport between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People's Republic of China	The People's Republic of China	10 years	Bilateral agreement
International road transport services - Passenger transportation - Freight transportation - Rental of non-commercial vehicles with/without driver	Reciprocity treatment	Countries that have the agreement on international road transport with Thailand	Indefinite	Reciprocal basis
Aircraft repair and maintenance services	Thailand will grant permission to airlines of those countries which treat Thai carriers on reciprocal basis	- Countries whose airline is accepted as a designated airline by Thailand under bilateral air services agreements - Countries whose regulations do not prevent Thai carriers from performing similar activities in that country	Indefinite	Reciprocal basis



THAILAND – LIST OF MFN EXEMPTIONS

For the 9th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Sector or sub sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Service sectors stipulated in the relevant articles of the Treaty of Amity and Economic Relations especially Articles 4 and 10	Only American citizens and entities are granted national treatment with respect to operating business and providing services in Thailand	The United States of America	10 years	Bilateral agreement



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868) - <i>Aircraft</i> (includes all machines that drive support in the atmosphere from the reaction of the except for objects which are exempted under the Ministerial Regulations) - <i>Major Aircraft Appliance</i> (an Engine, a Propeller and other appliances of an Aircraft designated by the Technical Commission) - <i>Technical Standard Order Article (TSO Article)</i> (an instrument, a mechanism, a part, an equipment and a component used or intended to be used in	1) None 2) None 3) (a) Aircraft maintenance: as indicated in 3.3 of the horizontal section (b) Major Aircraft Appliance maintenance as well as TSO Article and Aircraft Part maintenance: as indicated in 3.1 of the horizontal section (c) Service providers must perform their services outside the prescribed apron.	1) None 2) None 3) None	



Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<p>operating or controlling an Aircraft in flight, whether it is installed on or attached to the Aircraft, inside or outside)</p> <p>- Aircraft Part (an Airframe, part of an Airframe or part of a Major Aircraft Appliance)</p>			



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) As indicated in 3.3 of the horizontal section	1) None 2) None 3) None	



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	<p>1) (a) Services providers must use public telecommunication network under national telecommunication authorities</p> <p>(b) Radio application service is subject to frequency availability</p> <p>2) None</p> <p>3) (a) As indicated in 3.3 of the horizontal section</p> <p>(b) Service providers must use public telecommunication network under national telecommunication authorities and have to comply with terms and conditions set out in Thailand's 7th package of commitment on telecommunication services under AFAS.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Unbound</p>	



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) As indicated in 3.3 of the horizontal Section	1) None 2) None 3) None	



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) As indicated in 3.3 of the horizontal section	1) None 2) None 3) Unbound	



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew	1) None 2) None 3) As indicated in 3.3 of the horizontal section	1) None 2) None 3) Unbound	



THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments
Passenger Handling	1) None 2) None 3) (a) As indicated in 3.3 of the horizontal section (b) Selected by the owner or operator of licensed Aerodrome	1) None 2) None 3) Unbound	



VIET NAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



VIET NAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Selling and Marketing of Air Transport Services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



VIET NAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



VIET NAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



VIET NAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



VIETNAM – SCHEDULE OF COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) None	1) None 2) None 3) None	



VIET NAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Aircraft Catering Services	1) None 2) None 3) Commercial presence of foreign service supplier and/or providers is permitted up to 49%	1) None 2) None 3) None	



Salinan naskah resmi

Certified true copy

Nomor : 00102/CTC/02/2024/52

Number



Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 15 Februari 2024

Date